



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Caliadi  
Jabatan : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fachrul Razi  
Jabatan : Menteri Agama Republik Indonesia

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Fachrul Razi

Jakarta, 29 Januari 2020

Pihak Pertama,

Caliadi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DIREKTORATJENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan agama dan keagamaan Buddha	1 APK Nava Dhammasekha	0,0001%
		2 APK PTK Buddha	0,006%
2	Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan Buddha	1 Persentase PTK Buddha yang terakreditasi minimal Baik Sekali	50%
		2 Rerata nilai IPK PTK Buddha	2,8
		3 Persentase guru Nava Dhammasekha bersertifikat pendidik	60%
		4 Persentase guru Pendidikan agama Buddha yang bersertifikat pendidik	60%
		5 Persentase dosen PTK Buddha yang bersertifikat pendidik	18%
3	Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan	1 Persentase jurnal terakreditasi	10%
		2 Persentase jurnal ilmiah internasional yang tersitasi	10%
		3 Persentase lulusan PTK Buddha yang langsung bekerja	50%
4	Menguatnya karakter siswa yang memuat nilai religiusitas dan budi pekerti	Rerata nilai mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti pada sekolah	76
5	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimas Buddha yang efektif dan akuntabel	1 Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)	82
		2 Persentase penurunan temuan administrasi keuangan	60%
		3 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	76
		4 Nilai Penilaian Mandiri Zona Integritas (PMPZI)	75
		5 Indeks Profesionalitas ASN	80
6	Meningkatnya kualitas penyiaran agama yang berwawasan moderat	Rasio penyuluh agama dengan kelompok binaan yang mendapat bimbingan moderasi beragama	1:4
7	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	Nilai USBN pendidikan agama yang berwawasan moderat	76
8	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	Prosentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	75%
9	Meningkatnya ekspresi budaya bernafas agama	Persentase lembaga seni budaya keagamaan yang dibina	50%
10	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	1 Persentase layanan administrasi keagamaan yang digitalisasi	50%
		2 Prosentase kitab suci yang terdistribusi tepat sasaran	100%

**Program dan Kegiatan****Anggaran****Program Bimbingan Masyarakat Buddha**

1. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	Rp	29.060.541.000
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Buddha	Rp	25.193.034.000
3. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	Rp	63.870.113.000
4. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	Rp	124.786.983.000
5. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha	Rp	26.872.858.000
<b>Jumlah Seluruh</b>	<b>Rp</b>	<b>269.783.529.000</b>

**Menteri Agama****Fachrul Razi****Jakarta, 29 Januari 2020**  
**Direktur Jenderal****Caliadi**